

TAJUK RENCANA

Pilkada Sehat

PILKADA serentak 2020 tetap akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Nama-nama calon peserta Pilkada, lengkap dengan nomor urut masing-masing, telah ditetapkan oleh KPU setempat. Dalam kaitan ini, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito berharap pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, agar tercipta Pilkada yang sehat di masa pandemi Covid-19. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, yang merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa semua kegiatan Pilkada yang berpotensi mengundang kerumunan massa seperti konser musik, bazar, berbagai lomba, sepenuhnya dilarang. Menurut Plh Ketua KPU, Ilham Saputra, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni dan panen raya juga dilarang. Larangan tersebut jelas tertuang dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020: (1) partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser

musik. Selama ini, berbagai pihak memang telah menyatakan kekawatiran bahwa proses Pilkada 2020 bisa memunculkan ancaman kesehatan masyarakat. Bahkan PP Muhammadiyah minta agar Pilkada 2020 ditunda, karena pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius terhadap kesehatan. Apalagi dalam tahapan pendaf-taran bakal calon kontestan Pilkada 2020, banyak yang meng-abaikan protokol kesehatan, sehingga terjadi 243 kasus pelan-garan protokol kesehatan. Cukup beralasan kiranya kalau ada pihak-pihak yang khawatir Pilkada 2020 akan memunculkan klaster baru Covid-19. Ini tentunya juga merupakan peringatan sangat serius untuk penyelenggara maupun peserta Pilkada 2020. Pesta demokrasi serentak 2020 di-harapkan tidak hanya menjadi Pilkada Sehat, tetapi juga pesta demokrasi yang benar-benar se-hat. Dalam Pilkada 2020 ini, di DIY saja ada tiga kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, yakni Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul, dengan peserta sem-bilan pasangan calon. Pilkada Sleman (diikuti 3 pasangan calon), Bantul (2) dan Gunungkidul (4). Di Jawa Tengah, Pilkada 2020 akan digelar di 21 kabupaten/kota. Penyelenggara dan peserta Pilkada 2020 aka rela kalau sam-pai kesehatan masyarakat teran-cam akibat ada pengabaian ter-hadap protokol kesehatan? □



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Nasib Mata Pelajaran Sejarah

BEKALANGAN ini dunia pendidikan di Indonesia, utamanya pendidikan sejarah dihebohkan dengan desas-desus mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perubahan mata pelajaran sejarah dari wajib menjadi pilihan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Desas-desus tersebut menyebar begitu cepat, hingga berbagai pihak segera menulis tang-gapan, harapan, pun tuntutanannya. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dalam siaran persnya bernomor 92/SIPERS/09/AGSI/2020 me-nuntut agar posisi mata pelajaran se-jarah dikembalikan dalam kelompok dasar (istilah dalam struktur penyeder-hanaan kurikulum) sebagai mata pe-lajaran wajib yang diajarkan untuk se-mua anak bangsa di semua kelas (X, XI, dan XII) dan di semua jenjang (SMA, SMK, MA, dan MK). Tuntutan yang sama juga diu-tarakan oleh Masyarakat Sejarahwan Indonesia (MSI) yang meminta agar mata pelajaran sejarah tetap diperta-hankan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah menengah, karena meru-pakan instrumen strategis untuk mem-bentuk identitas dan karakter siswa, serta setiap siswa di setiap jenjang berhak mendapatkan pendidikan se-jarah dengan kualitas yang sama. Ada pula Ikatan Himpunan Mahasis-wa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI) yang juga menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-dikbud) untuk tegas dalam mempo-sisikan mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran wajib. Tuntutan-tuntutan tersebut langsung direspons oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melalui akun instagram

kemdikbud.ri. Sayangnya, respons yang ia sajikan kurang menjawab tun-tutan-tuntutan yang beredar. Respons yang disajikan berkuat pada tidak akan menghapus mata pelajaran se-jarah. Terkait dengan kedudukannya sebagai mata pelajaran pilihan atau wajib, tampaknya belum ada respons yang jelas. Entah tidak teliti dalam membaca tuntutan-tuntutan yang beredar, atau sekadar ingin mene-nangkan massa. Tentunya, seluruh guru mata pelajaran sejarah di Indonesia menunggu kejelasan dari beliau. Dari desas-desus hingga tuntutan yang ada, setidaknya bisa diperoleh sebuah penyadaran mengenai pen-tingnya mata pelajaran sejarah. Tetapi, penting saja belumlah cukup. Dibutuh-kan inovasi dan kreativitas yang menyertainya, sehingga membuatnya bisa bersaing dengan mata pelajaran lain yang kerap kali dinilai lebih menun-jang kemajuan Indonesia. Inovasi dan kreativitas dalam cara penyampaian, media, hingga muatan di dalamnya. Sudah bukan lagi zamannya, sejarah dilabeli sebagai mata pelajaran yang membosankan, sekadar hafalan, atau perang-perangan. Upgrading terhadap guru sejarah perlu segera diagen-dakan, baik oleh kementerian maupun organisasi pemerhati sejarah. Ingatlah, tanpa sejarah alias masa lalu, tidak akan ada Indonesia masa kini. Dari se-jarah, seseorang bisa menjadi bijak. Semoga, apa yang sekarang sedang terjadi dapat menjadi momen kebangkitan mata pelajaran sejarah di Indonesia. Semoga saja, mari kita kawal dan doakan. □ **Pratika Rizki Dewi, Mahasiswa S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UGM.**

Koran Kedaulatan Rakyat, Pers yang Bijak

DIBERI nama Walikota Yogyakarta Poerwokoesoemo dengan kata *Souverignity* setelah para pejuang merebut Koran Matahari, korannya Jepang. Di kemudian hari pada ulang-tahun ke 10 RS Mata Yap, oleh Dokter Yap, koran ini kemudian diberi-nama Kedaulatan Rakyat. Diharapkan koran akan selalu menyuarakan suara hati nurani rakyat yang berdaulat. Karenanya para pendiri koran ini menggu-nakan dasar Pancasila sebagai acuan pengembangan persnya.

Didalam pemahaman inilah ciri pers yang dianut Kedaulatan Rakyat adalah pers yang bijak. Diperlukan kearifan mendalam tentang hidup dan kehidupan dan tentang pemahaman pers sendiri. Seorang wartawan SKH Keda-ulatan Rakyat tidak bisa dibentuk dalam satu dua tahun tetapi lebih dari tiga tahun untuk mendalami benar-benar tentang misi SKH Keda-ulatan Rakyat selaras dengan sem-boyannya ‘Suara Hati Nurani Rakyat’.

Dikritik

Penonjolan pemberitaan, dite-kankan pada bobot materi berita, fakta akurat dan mengarahkan pembaca kepada misi pemahaman akan berita secara cerdas dan bermanfaat. Terhadap kebijakan pe-merintah yang kurang menyentuh masyarakat banyak, dikritik dengan bi-jak oleh SKH Kedaulatan Rakyat. Meski demikian di dalam menyajikan berita-berita panas, senantiasa memberikan sentuhan bijak dalam nuansa yang di-ngin dan penuh kearif bijaksanaan. Akibatnya kerap dituduh bahwa ‘ko-rannya rakyat’ ini dianggap kurang be-rani dalam menyajikan berita. Semangat boleh panas membara, tetapi kepala harus tetap dingin, itulah sem-boyan para redaktornya. Apa yang ter-saji menjadi sejuk dan memberikan suasana yang tenteram, tidak meledak-ledak.

Sugeng Wiyono AL

Inilah yang melatarbelakangi sema-ngat wartawan SKH Kedaulatan Rakyat dilandasi dengan semangat warisan luhur *tut wuri angiseni*’. Berjalan di belakang sambil mengisi. Rupanya *tut wuri angiseni* ini benar-be-nar berhasil. Kontinyu dan mendalam. Bukan indoktrinasi. Menanamkan pemikiran baru ke da-



KR-JOKO SANTOSO

lam jiwa orang bukan perkara gampang. Kita harus lebih dulu tahu kondisi tanah yang akan kita taburi gagasan baru. Cocok atau tidak. Apabila tidak cocok, ja-ngan. Tidak bijaksana apabila dipak-sakan juga, sebab paling sedikit man-faatnya tidak ada. Apabila buminya co-cok, kitapun harus berhati-hati. Sebab pikiran baru tidak senantiasa segera di-setujui. Bukankah manusia cenderung untuk menganggap pikiran orang lain kurang bermutu daripada gagasan sen-diri? Oleh karenanya mengemukakan pikiran baru perlu disertai taktik untuk melapangkan medan, untuk paling tidak mengurangi hambatan dan mental

pihak yang kita perkenalkan dengan gagasan baru. Dalam hal ini *tepa slira* pun berlaku.

Diperlukan

Kritik oleh pers sebagai pelaksana sosial kontrol diperlukan. Apabila kon-struktif, jelas jauh dari angan-angan merusak ataupun subversi, pasti disam-but baik. kalau memang mengenai soal-nya dan bermutu, pasti dijadikan buah pertimbangan. Sebaliknya, apabila cara mengemukakanya tanpa berpegang pa-da kode etik pergaulan Bangsa Indonesia, paling banter kita mem-buat massa jauh dari pembaca tidak senang, pejabat ataupun tokoh masyarakat mengangkat hidung. Itu tidak menguntungkan nama baik surat kabar dan karyawan-nya. Hambatan mental yang masih harus disingkirkan oleh bangsa ki-ta yang mengangankan masyarakat adil makmur diridhai Tuhan masih banyak. Pers sebagai ‘avant garde’ memelopori penyingkiran hambatan-hambatan itu. Tradisi pers Indonesia cukup menguntungkan, suara pers didengar orang. Ini modal besar. Tinggal kita gunakan sebaik-baiknya dengan berpegang kepada kode etik bangsa, kode etik jurnalistik Indonesia sambil memo-hon ridha Tuhan yang Maha Esa.

Selamat ulang tahun SKH KR. Semoga semakin jaya dan mewarnai pers Indonesia. □

*) **Sugeng Wiyono AL**, pernah men-jadi Wartawan Kedaulatan Rakyat, se-karang Sekretaris Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

KR , Tetaplah ‘Migunani Tumraping Liyan’

MERAYAKAN usia 75 lazim disebut sebagai pesta berlian. Bagi manusia sudah terbilang tua. Terlebih bila kita bandingkan dengan rata-rata usia manusia zaman sekarang, 55-60 tahun. Pencapaian pesta berlian berarti sudah mendapat ‘bonus’ 15 tahun. Dalam aturan kepegawaian, bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan fungsional, usia ini sudah purna tugas selama 17 tahun. Sebab masa purna tugas atau pensiun bagi pegawai non-fungsional adalah 58 tahun.

Hanya saja, usia media massa dalam hal ini Kedaulatan Rakyat tidak bisa disamakan dengan usia manusia. Media massa - bahkan wartawan - tidak mengenal kata pensiun. Karenanya, tidak ada kata purnatugas bagi Kedaulatan Rakyat. Pembaca atau pecintanya berharap Kedaulatan Rakyat akan terus hidup selamanya.

Merambah Digital.

Memasuki usia berlian, Kedaulatan Rakyat makin eksis dan menunjukkan kemapanan. Terbukti dengan makin berkembang, tidak hanya dalam edisi cetak namun juga merambah ke dunia digital dalam edisi online. Kini juga bertambah media yang dikelola. Tidak hanya Minggu Pagi juga ada Koran Merapi. Selain itu pernah ada Mekar Sari, Kandha Rahardja dan Kawanku. Mekar Sari, Kandha Raharja dan Kawanku, di sekitar tahun tujuh puluhan sempat eksis terbit mandiri. Kala itu Mekar Sari terbit mingguan sebagai majalah berbahasa Jawa. Kandha Raharja terbit mingguan sebagai Koran Masuk Desa juga menggunakan Bahasa Jawa. Ide memasukkan ketiga media tersebut sebagai suplemen, patut diacungi jempol. Tetap menerbitkan Mekar Sari merupakan upaya melestarikan budaya dan Bahasa Jawa. Kandha Raharja dipertahankan terbit untuk mengem-

Yohanes Siyamta

bankan wawasan masyarakat desa. Sedangkan Kawanku sebagai ajang mewadahi kreativitas anak. Bersemboyankan ‘Suara Hati Nurani Rakyat’, sejak masa kemerdekaan, Orla, Orba dan era reformasi ini, Kedaulatan Rakyat menjadi saluran hati nurani rakyat. Objektif, jujur dan berimbang dalam paparan opini serta pemberitaan, hingga kini tetap dijaga dan dipertahankan. Semboyan yang melekat di halaman depan koran kita ini, tidak sekadar menjadi slogan ko-song namun sungguh nyata dalam tindakan dan perbuatan. Komitmen berpihak pada rakyat, terlebih rakyat yang menderita karena kesusahan atau bencana sungguh telah dan selalu dijalankan. Ketika bencana atau kesusahan melanda bangsa ini — gempa bumi, banjir, tanah longsor, pandemi Covid 19, dan sebagainya - Kedaulatan Rakyat melakukan gerakan nyata mengum-pulkan dan menyalurkan bantuan yang sungguh meringankan beban rakyat yang tengah menderita akibat bencana tersebut.

Pengabdian

Dengan motto ‘Migunaning Tumraping Li-yan’, Kedaulatan Rakyat berusaha menunjukkkan semangat pengabdian yang tulus untuk melak-sanakan karya dan berguna bagi sesama. Motto berbahasa Jawa tersebut bermakna sungguh dalam. Kedaulatan Rakyat melakukan *tapa ngrame*. Yakni bertapa dengan cara berkelana dan selalu

membantu dan menolong sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Memberi makanan bagi yang kelaparan. Memberi minum bagi yang tengah kehausan. Memberi pakaian bagi yang telanjang. Memberi penerang bagi yang mengalami kegelapan. Memberikan tongkat bagi orang yang berjalan dalam tanah yang licin. Menunjukkan arah bagi orang tersesat. Dan masih banyak lagi perbuatan lain. Semuanya bertujuan membantu dan menolong sesama. Selamat buat Kedulatan Rakyat beserta seluruh jajarannya. Semoga semboyan ‘Suara Hati Nurani Rakyat’ dan motto ‘Migunani Tumraping Liyan’, tetap tak sekadar jadi slogan kosong, namun sungguh nyata dalam karya dan tindakan. Sehingga seluruh gerak, karya dan tindakan Kedaulatan Rakyat makin berguna bagi seluruh rakyat dan bangsa serta sesama. Pesta Berlian tetaplah *migunani tumraping liyan*. □ *) **Yohanes Siyamta**, pustakawan dan Sastrawan Jawa

Pojok KR

Pilkada serentak 2020 diharapkan menjadi Pilkada Sehat.
- **Harus sehat.**

Jika Pilkada 2020 munculkan klaster baru, Muhammadiyah akan gugat pemerintah.
- **Catat itu!**

Di Rumah Sakit Rujukan, pasien Covid-19 tidak dibebani biaya.
- **Alias gratis?**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang** : H Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten** : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo** : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.